

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2008 silam terjadi krisis moneter yang berdampak signifikan pada perekonomian sejumlah negara besar, hal ini memicu penurunan yang mendorong banyak negara untuk merancang strategi baru guna bangkit dari keterpurukan perekonomian negaranya. Dalam situasi tersebut, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa semakin mendominasi organisasi internasional di bidang keuangan. Dominasi ini memperburuk posisi negara berkembang, yang mendapatkan peran dan hak yang semakin terbatas dalam organisasi internasional. Untuk mengurangi pengaruh dominasi tersebut dan mendukung negara-negara berkembang dalam perekonomian global, dibutuhkan sebuah himpunan atau organisasi yang dapat menjadi solusi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan asosiasi ekonomi BRICS pada tahun 2009, yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (PUTRI, 2024).

BRICS merupakan forum kerjasama global non-formal yang terdiri dari beberapa negara EME (*Emerging Market Economy*) dengan pertumbuhan ekonomi pesat, yang dikelompokkan dalam satu ruang lingkup : Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (Arapova & Lissovlik, 2021). Kelompok ini disebut juga sebagai komunitas geopolitik formal yang memiliki agenda pertemuan puncak tahunan dan melakukan kegiatan koordinasi politik. Mewakili negara-negara tersebut, BRICS saat

ini memiliki setidaknya \$4 triliun cadangan devisa global (*global foreign reserves*) atau dengan kata lain sepertiga populasi dunia diwakili oleh mereka (Bag & Chandra Das, 2024). Selain itu, penyebutan BRICS juga dilakukan seiring berjalannya waktu, yang sebelumnya dikenal sebagai BRIC yang hanya terdiri dari : Brazil, Rusia, India, dan China, barulah pada tahun 2010 Afrika Selatan ikut tergabung di dalamnya.

BRIC adalah akronim yang dicetuskan oleh seorang ekonom bernama Jim O'Neill pada tahun 2001, yang kini menjabat sebagai kepala penelitian ekonomi global di *Goldman Sachs*, untuk merujuk pada negara-negara Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. O'Neill meyakini kelompok BRIC mampu bersaing dengan dominasi negara-negara *G7* (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat) di tingkat ekonomi global (Rao & Padhi, 2020).

Menurut data yang termuat dalam *Hang Seng China Enterprises Index* (HSCEI) tahun 2007, negara-negara BRIC menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian global dengan meningkatkan nilai pasar saham sebesar 817% (Callataÿ, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara BRIC menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada awal perkembangannya. BRICS saat ini memiliki agenda pertemuan puncak tahunan atau biasa disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan banyak diskusi mengenai perekonomian global.

Pada tahun 2022 tepatnya pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-14, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa kelompok yang terdiri dari lima negara dengan total PDB gabungan hampir \$18 triliun tengah mengembangkan mata uang cadangan global baru. Mata uang ini dirancang sebagai alternatif mekanisme

pembayaran global, dengan tujuan menggantikan peran komponen cadangan devisa *Special Drawing Rights* (SDR) yang dikelola oleh Dana Moneter Internasional (IMF). SDR saat ini terdiri dari mata uang denominasi euro, yen, pound sterling, dan dolar AS (He dkk., 2020)

Negara-negara BRICS dikenal memiliki salah satu tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Melalui inisiatif kolektif de-dolarisasi yang solid, BRICS menunjukkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan "keahlian finansial kolektif" untuk menantang tatanan internasional liberal yang sudah mapan (Phiri, 2022). Institusi seperti NDB (*New Development Bank*) dan CRA (*Contingent Reserve Arrangement*) merupakan contoh nyata dari upaya kolektif BRICS dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan global. (Coquidé dkk., 2023) BRICS tidak hanya mereformasi struktur kekuasaan tradisional dalam sistem yang ada, seperti Organisasi Perdagangan Dunia, tetapi juga menjadi penunjang bagi koalisi negara-negara berkembang yang lebih besar untuk menantang dominasi Amerika Serikat (Qabhobho, 2023).

Selama sepuluh tahun terakhir, negara-negara ini mencatatkan pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 6,5%, dengan total kontribusi terhadap PDB global melebihi 23% (Wang dkk., 2019). Rencana untuk menciptakan mata uang cadangan baru oleh negara-negara BRICS telah dimulai sejak Konferensi Tingkat Tinggi pertama BRIC yang diadakan di Yekaterinburg pada 16 Juni 2009 (saat itu Afrika Selatan belum menjadi anggota). Dalam pertemuan tersebut, negara-negara BRIC menekankan perlunya mata uang cadangan global yang bisa menjadi alternatif serta lebih terdiversifikasi, stabil, dan dapat diprediksi. Hal ini mencerminkan mulai memudarnya

kepercayaan BRIC terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Idealnya mata uang yang baik harus memiliki tiga prinsip utama didalamnya: “keamanan, likuiditas, dan imbal hasil” (Kodaki, dkk., 2022)

Meskipun telah lama menjadi mata uang utama dalam sistem pembayaran global, dolar AS terbukti rentan terhadap ketidakstabilan, yang dapat memengaruhi keuangan global. Kerentanan ini terlihat dari perannya sebagai mata uang cadangan dominan yang beberapa kali mengalami siklus depresiasi, seperti pada periode krisis tahun 1977-1979, 1985-1988, 1993-1995, dan 2007-2008 (Dolan & Kroll, 2016). Ide pembentukan mata uang cadangan baru bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar AS sebagai alat tukar utama dalam ekonomi global. Hal ini juga mencerminkan posisi BRICS sebagai kelompok entitas politik global yang secara konsisten menjadi oposisi terhadap dominasi Barat dalam tata kelola keuangan dunia. Salah satu bentuk dominasi Barat ini terlihat melalui perjanjian Bretton Woods, yang telah menetapkan aturan dalam perdagangan dan keuangan global selama hampir delapan puluh tahun.

Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi mata uang asing, mencegah terjadinya devaluasi mata uang secara kompetitif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi global (Dharma dkk., 2024). Dengan demikian, sistem ini membentuk tiga rezim dan institusi yang berfungsi sebagai regulator atau infrastruktur keuangan global, yaitu IMF, Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Berdasarkan regulasi IMF, setiap negara anggota perjanjian *Bretton Woods* harus menetapkan nilai tukar mata uang mereka (*parity price*) terhadap dolar AS atau emas dengan nilai ekuivalennya. Sementara itu, ketetapan konversi dolar AS

ke emas adalah 1 ons emas setara dengan \$35 (Saragih, 2016). Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana negara-negara Barat dapat menguasai tata kelola keuangan internasional melalui sistem keuangannya. Untuk melawan dominasi tersebut, BRICS mendirikan *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) di tahun 2013 tepatnya pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-5, sebagai alternatif untuk institusi seperti Bank Dunia dan IMF, dengan tujuan memperkuat sistem keuangan negara-negara anggotanya (Syaifullah, 2024).

Tujuan utama pembentukan institusi-institusi ini adalah untuk menggalang "sumber daya untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS, ekonomi berkembang, serta negara-negara berkembang lainnya." Selain itu, pembentukan institusi ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan negara berkembang pada pinjaman keuangan dalam pembangunan ekonomi mereka. Perspektif ekonomi moneter Islam juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Dalam ekonomi moneter Islam, peran mata uang mencakup aspek keadilan, keseimbangan, stabilitas, dan kemandirian ekonomi, yang memiliki dampak signifikan dalam merancang sistem keuangan internasional yang lebih inklusif dan adil (Naresh dkk., 2018)

Sistem ekonomi moneter Islam adalah sistem ekonomi yang memiliki tujuan tertentu, di antaranya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqashid syariah menekankan pentingnya keadilan (Iqamah al'Adl), yang berarti menciptakan keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia, serta menghasilkan kemaslahatan (jalb al-maslahah), yang bertujuan untuk memberikan manfaat, baik secara umum maupun

untuk kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengatur atau mengendalikan kondisi perekonomian di suatu negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan cara menstabilkan harga dan mencegah inflasi. Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat mengelola jumlah uang yang beredar, baik dengan mempertahankan, mengawasi, maupun menyesuaikan jumlah uang yang beredar di negara tersebut (Sobarna, 2019).

Untuk menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar, bank sentral perlu memastikan kestabilan tersebut terjaga. Keberhasilan upaya ini dapat diukur melalui perbaikan neraca pembayaran dan terciptanya stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan ini sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi pada umumnya, yaitu menyeimbangkan dan menstabilkan mata uang, menjaga likuiditas, menciptakan instrumen keuangan yang beragam, mendorong transparansi, dan memastikan mekanisme pasar yang efektif. Dengan demikian, perekonomian suatu negara dapat tumbuh sesuai harapan seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Menurut keterangan beberapa ulama ahli tafsir, ayat ini mengandung pesan bahwa memperoleh harta dengan cara yang tidak benar dapat menimpa siapa saja. Bahkan jika harta tersebut secara hukum telah diputuskan oleh hakim sebagai milik kita, tetap saja harta tersebut dianggap haram karena diperoleh melalui cara yang tidak jujur, seperti memanipulasi fakta agar terlihat seolah-olah kita berhak memilikinya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya hal ini tidak hanya berlaku pada lingkup mikro saja namun juga berlaku pada lingkup makro, dengan demikian keadilan yang menjadi landasan prinsip islam menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah perekonomian negara.

Tujuan dari BRICS dalam memperjuangkan sistem keuangan alternatif yang tidak bergantung pada dolar AS, serta memperjuangkan representasi negara-negara Selatan dalam tata kelola global, sejalan dengan maqashid syariah dalam aspek keuangan, yaitu: mencegah ketimpangan (*zulm*), mempromosikan distribusi kekayaan yang adil (*tawazun*), dan menciptakan stabilitas ekonomi berkelanjutan (*istiqrar iqtisadi*) (Sobarna, 2019). Dengan menolak hegemoni tunggal sistem Barat dan mendorong keberagaman model pembangunan ekonomi, BRICS secara tidak langsung mengusung semangat keadilan ekonomi dalam skala global suatu hal yang menjadi ruh utama dalam ekonomi Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 188.

BRICS juga mengedepankan inklusivitas dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan internasional, menghindari dominasi satu negara atau kelompok atas yang lain. Hal ini mencerminkan semangat syura (musyawarah), yaitu prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan, yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem

pemerintahan dan ekonomi Islam. Dengan demikian, BRICS bukan hanya sekadar kelompok ekonomi alternatif, tetapi juga bisa dipandang sebagai gerakan reformasi global yang membuka ruang bagi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan internasional (Phiri, 2022; Coquidé dkk., 2023).

Penulis sangat tertarik dengan latar belakang diatas, maka dari itu penulis berupaya melakukan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “ANALISIS POTENSI MATA UANG BRICS SEBAGAI ALTERNATIF DOLAR AS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MONETER ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah mata uang BRICS berpotensi bersaing dengan mata uang Dolar AS ?
2. Apa kelebihan BRICS Sebagai mata uang?
3. Bagaimana Ekonomi Moneter Islam memandang mata uang Brics sebagai alternatif Dolar AS ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah mata uang Brics mampu bersaing dengan mata uang Dolar AS atau tidak
2. Untuk mengetahui apa kelebihan BRICS sebagai mata uang
3. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi moneter islam memandang mata uang Brics sebagai alternatif Dolar AS



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis, serta pembaca pada umumnya, dalam bentuk wawasan dan pengetahuan baru secara teoritis terkait analisis mata uang BRICS sebagai alternatif dolar AS dalam perspektif Islam.

Lebih jauh dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana mata uang cadangan global yang diusulkan oleh BRICS dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, stabilitas, dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam ekonomi moneter Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademis yang berguna bagi pengembangan literatur keuangan Islam, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan praktisi untuk mewujudkan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk merancang strategi pengembangan mata uang alternatif seperti mata uang BRICS, yang berlandaskan prinsip keadilan, stabilitas, dan keseimbangan sesuai nilai-nilai Islam, guna memperkuat sistem keuangan nasional yang mandiri dan kompetitif secara global.

Bagi institusi keuangan Islam, penelitian ini dapat memberikan panduan penerapan prinsip-prinsip ekonomi moneter Islam dalam sistem keuangan internasional, khususnya dalam menciptakan instrumen mata uang yang adil dan stabil sebagai alternatif dolar AS.

Bagi pelaku ekonomi dan praktisi keuangan, penelitian ini menawarkan wawasan tentang peluang dan tantangan penggunaan mata uang BRICS dalam transaksi internasional, sehingga membantu mereka dalam memanfaatkan potensi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di pasar global.

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk studi lebih lanjut mengenai peran mata uang dalam sistem keuangan Islam serta pengembangan alternatif sistem keuangan global yang lebih inklusif. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya mata uang alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dampaknya dalam menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata di tingkat global.